



Analisis Peran Indonesia dalam Anti Piracy Angkatan Laut untuk Mengamankan Jalur Perdagangan Internasional

Jemaon¹, Eko Arie Kurniawan², Agung Setiawan³

^{1,2,3}Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: jemaon15@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-07-22 Revised: 2024-08-19 Published: 2024-09-06 Keywords: <i>Indonesia;</i> <i>Anti Piracy;</i> <i>Security;</i> <i>Maritime;</i> <i>Trade.</i>	This journal writing analyzes related to Indonesia's strategic role in international anti-piracy cooperation in improving the security of international trade routes. With a focus on the Malacca Strait and involvement in multinational operations, this journal discusses the evaluation of the effectiveness of the defense strategy implemented by the Indonesian Navy, compared to the approaches taken by other countries such as Malaysia and Japan. The results of the journal writing show that international cooperation and increased operational capacity significantly improve maritime security and economic stability, while strengthening military diplomacy and regional cooperation, in addition this journal also discusses the challenges faced in implementing this policy and provides recommendations for future maritime security strategies.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-07-22 Direvisi: 2024-08-19 Dipublikasi: 2024-09-06 Kata kunci: <i>Indonesia;</i> <i>Anti Piracy;</i> <i>Keamanan;</i> <i>Maritim;</i> <i>Perdagangan.</i>	Penulisan jurnal ini menganalisis terkait dengan peran strategis Indonesia dalam kerjasama internasional anti piracy dalam meningkatkan keamanan jalur perdagangan internasional. Dengan fokus pada Selat Malaka dan keterlibatan dalam operasi multinasional, jurnal ini membahas terkait dengan evaluasi efektivitas strategi pertahanan yang diterapkan oleh Angkatan Laut Indonesia, dibandingkan dengan pendekatan yang dilakukan oleh negara-negara lain seperti Malaysia dan Jepang. Hasil Penulisan jurnal menunjukkan bahwa kerjasama internasional dan peningkatan kapasitas operasional secara signifikan meningkatkan keamanan maritim dan kestabilan ekonomi, sambil memperkuat diplomasi militer dan kerjasama regional, selain itu jurnal ini juga membahas terkait tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan ini dan memberikan rekomendasi untuk strategi keamanan maritim di masa depan.

I. PENDAHULUAN

Sebuah negara memiliki pertimbangan tersendiri dalam melakukan kerja sama internasional dengan negara lain. Salah satu kerja sama internasional yang dilakukan antarnegara adalah untuk menangani suatu isu regional maupun global. Hal ini dilakukan karena negara tersebut tidak bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, sebagai contoh adalah masalah transnasional yang merupakan kejahatan lintas negara dan tentunya merugikan beberapa negara (Swastika, 2018). Salah satu kejahatan lintas negara yang menjadi perhatian banyak negara khususnya Indonesia adalah kejahatan di Laut. Laut merupakan penghubung utama antar negara – negara di dunia, meskipun beberapa kawasan negara berada di kawasan *landlocked* namun tidak menutup kemungkinan negara tersebut membutuhkan laut. Hal tersebut dikarenakan hampir 90% aktivitas negara menggunakan jalur laut (Conway, 2008).

Salah satu kejahatan transnasional di wilayah maritim adalah kejahatan perompakan.

Perompakan menjadi kejahatan yang mengganggu kestabilan wilayah maritim bagi beberapa negara karena perompakan dapat mengganggu kestabilan jalur perdagangan internasional (Saraswati, 2020). Selain itu pembajakan kapal di jalur perdagangan internasional seperti Selat Malaka dan Teluk Aden juga dapat menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan negara dan ekonomi global. Indonesia berada di posisi strategis dalam rute pelayaran tersebut, sehingga Indonesia dapat memainkan peran vital dalam penanganan masalah keamanan maritim. Adapun dampak dari pembajakan kapal terhadap ekonomi adalah peningkatan biaya asuransi dan operasional kapal yang berujung pada kenaikan harga barang konsumsi. Dari adanya dampak tersebut maka dapat memperkuat perlunya upaya peningkatan keamanan maritim yang melibatkan kerjasama internasional untuk melindungi jalur perdagangan yang krusial di wilayah laut (Miller, 2022).

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) sebagai garda terdepan dalam usaha

penanganan pembajakan telah melaksanakan berbagai operasi keamanan maritim. Operasi-operasi ini tidak hanya berhasil menurunkan jumlah insiden pembajakan tetapi juga memperkuat kepercayaan internasional terhadap keamanan jalur pelayaran di kawasan ini. Kegiatan ini menjadi kunci dalam mengurangi kerugian ekonomi dan memastikan stabilitas keamanan jalur perdagangan yang melintasi wilayah Indonesia. Keterlibatan Indonesia dalam inisiatif global dan regional untuk mengatasi pembajakan menunjukkan komitmen negara dalam memerangi kejahatan maritim. Kerjasama internasional yang melibatkan patroli bersama dan pertukaran informasi telah membantu dalam menyusun strategi yang lebih efektif dan taktis. Partisipasi dalam resolusi PBB dan kerjasama dengan negara lain dapat memberikan penegasan posisi strategis Indonesia dalam jaringan keamanan maritim global (Miller, 2022).

Dalam konteks kerja sama internasional untuk menangani isu kejahatan maritim terutama pembajakan yang mengganggu jalur perdagangan global, penting untuk dapat memahami bagaimana negara-negara lain termasuk Indonesia merespons dan berkolaborasi dalam mengatasi kejahatan transnasional ini. Sehingga adanya penulisan jurnal ini dapat ditelaah bagaimana permasalahan yang akan dibahas mengenai efektivitas kerja sama internasional tersebut dan peran strategis Indonesia dalam mengamankan jalur perdagangan yang vital. Perlu diteliti bersama terkait dengan upaya antarnegara dalam mengatasi perompakan mempengaruhi keamanan maritim dan stabilitas ekonomi, serta implikasi bagi kebijakan keamanan maritim Indonesia di masa depan.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah kualitatif berbasis jurnal dokumen dengan mencari sumber-sumber sekunder berupa berita, dokumen teknis dan kajian sebelumnya. Dalam penulisan jurnal, penulis merumuskan pendekatan ini untuk dapat berinteraksi langsung dengan data dari berbagai era dan konteks tanpa adanya keterbatasan, dapat mengeksplor konteks yang sesuai dengan Penulisan jurnal serta dapat memahami isu yang diteliti secara komprehensif. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang memberikan wawasan baru tentang kerjasama internasional dalam mengatasi pembajakan di jalur perdagangan internasional, serta implikasi strategis bagi Indonesia (Mestika Zed, 2008)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis peran Angkatan Laut Indonesia dalam Operasi *Anti-Piracy*

Dalam kerangka keamanan maritim regional, Angkatan Laut Indonesia memegang peranan penting dalam usaha pengendalian pembajakan di kawasan Asia Tenggara. Menurut artikel di *The Diplomat* (2023), upaya ini meliputi kerjasama yang dikordinasikan, patroli bersama dan pembangunan kapasitas keamanan, yang merupakan respons terhadap peningkatan insiden perompakan dan pencurian bersenjata di perairan strategis seperti Selat Malaka dan perairan sekitarnya. Efektivitas operasi ini terlihat dari penurunan insiden yang signifikan, namun tantangan masih berlanjut mengingat strategi para pelaku kejahatan yang terus berkembang dan adaptif.

Sementara itu, kerjasama militer internasional juga menonjol dalam strategi Indonesia mengatasi masalah keamanan maritim. Melalui latihan bersama dengan negara lain seperti Pakistan yang dilaporkan oleh *The Diplomatic Insight* (2023), Angkatan Laut Indonesia berusaha meningkatkan kapasitas dan kemampuan operasional dalam menanggapi ancaman pembajakan. Latihan ini tidak hanya meningkatkan keterampilan militer, tetapi juga memperkuat hubungan diplomasi militer yang berperan penting dalam membangun kerjasama keamanan yang lebih luas di tingkat regional dan global. Febrica (2023) juga membahas tentang peran Indonesia dalam kerjasama internasional melawan pembajakan. Dalam konteks ini, Indonesia terlibat dalam inisiatif global yang didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB yang bertujuan untuk mengintegrasikan upaya negara-negara di kawasan dalam menghadapi ancaman pembajakan. Inisiatif ini menekankan pentingnya kerjasama lintas negara dan penguatan hukum nasional untuk menanggapi secara efektif dan efisien terhadap ancaman yang ada. Menurut Kementerian Perhubungan (2018) sebanyak 90% dari jalur perdagangan dunia menggunakan jalur laut dan 40% diantaranya melalui Indonesia. Hal ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi Negara Poros Maritim Dunia dengan meningkatkan system transportasi laut yang terintegrasi. Namun masalah transnasional seperti perompakan dapat menjadi penghalang hal itu terwujud.

Berdasarkan data diatas, peran TNI AL dalam operasi *anti-piracy* merupakan komponen krusial dalam menjaga kestabilan keamanan maritim regional. Melalui serangkaian operasi yang terkoordinasi, kerjasama internasional dan peningkatan kapasitas operasional, Indonesia mampu menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengatasi masalah pembajakan yang tidak hanya berdampak pada keamanan nasional tetapi juga pada kestabilan ekonomi dan keamanan global. Upaya ini mendemonstrasikan pentingnya kerjasama internasional dalam mengatasi masalah keamanan yang kompleks dan lintas batas.

2. Perbandingan Upaya *Anti-Piracy* Indonesia dengan Negara Lain

Swastika (2018) membahas mengenai Jepang yang berperan aktif dalam kerja sama *anti-piracy* di Asia Tenggara dipengaruhi oleh kepentingan negara. Jepang dikenal sebagai negara maritim meskipun bukan termasuk negara yang terletak di Asia Tenggara, namun Jepang memiliki *Maritime Self-Defense Force* dan *Coast Guards* yang bertugas untuk menjaga keamanan maritim baik itu di dalam negeri maupun luar negerinya. Selain itu, Jepang juga memiliki personel maritim lebih banyak dari pada negara – negara lain di Asia Tenggara. Hal ini membuat negara – negara di Asia Tenggara membutuhkan kontribusi Jepang dalam operasi *anti-piracy* karena Jepang dianggap dapat mengakomodasikan operasi *anti-piracy*.

Selanjutnya, dalam jurnal yang diteliti oleh Tseng, Her dan Pilcher (2021), mengevaluasi negara Nigeria dalam menangani masalah *piracy*. Hasilnya Tindakan Indonesia lebih efektif dibandingkan dengan Nigeria dalam mengurangi serangan bajak laut, terutama di Selat Malaka. Ini menunjukkan keberhasilan Indonesia dalam menerapkan strategi pertahanan yang efektif dan dapat dijadikan model bagi negara lain dalam menghadapi masalah serupa. Kemudian Poonnawatt (2023) menyoroti Malaysia yang melakukan langkah yang sama dengan Indonesia, hasilnya Malaysia melakukan kerja sama multilateral dengan Indonesia untuk menghadapi ancaman bersama dan mendemonstrasikan bagaimana kerjasama regional dapat meningkatkan keamanan maritim secara efektif.

Peran aktif Jepang dalam kerja sama *anti-piracy* di Asia Tenggara dikarenakan Jepang

terdorong oleh kepentingan nasionalnya sebagai negara maritim, meskipun Jepang bukan bagian dari Asia Tenggara, tetapi Jepang memiliki kapasitas besar dalam *Maritime Self-Defense Force* dan *Coast Guards* dalam menjaga keamanan maritim. Keberadaan sumber daya maritim yang besar ini memungkinkan Jepang untuk memberikan kontribusi signifikan dalam operasi *anti-piracy* di kawasan tersebut, sehingga negara – negara di Asia Tenggara memandang penting kerjasama dengan Jepang. Hal ini dapat dijadikan cerminan bagi Indonesia untuk senantiasa melakukan pembaharuan atau peningkatan dari segi sumber daya manusia serta teknologi agar dapat menangani kejahatan transnasional perampokan di wilayah maritim Indonesia.

Dibandingkan dengan Nigeria dalam mengurangi serangan bajak laut khususnya di Selat Malaka, Indonesia dinilai berhasil menerapkan strategi pertahanan yang efektif, yang dapat dijadikan model bagi negara lain yang menghadapi masalah serupa. Keberhasilan ini mencerminkan kapasitas Indonesia dalam mengatasi tantangan keamanan maritim melalui pendekatan yang terkoordinasi dan strategis. Selain itu untuk memperkuat pertahanan maritim, negara Malaysia telah meningkatkan kerjasama multilateral dengan Indonesia dalam menghadapi ancaman maritim, hal ini menunjukkan bahwa ternyata kerjasama regional antara Indonesia dengan Malaysia dapat secara efektif meningkatkan keamanan maritim. Langkah ini menegaskan pentingnya kolaborasi antarnegara di kawasan dalam menangani ancaman keamanan yang semakin kompleks dan dinamis.

3. Dampak Kebijakan dan Operasi *Anti-Piracy* Terhadap Keamanan Jalur Perdagangan

Menurut Pasal 101 dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, perompakan merupakan kejahatan transnasional yang dapat berupa kekerasan, penahanan dan penyusutan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi oleh awak atau penumpang sebuah kapal dan biasa terjadi di tengah laut lepas. Paige (2016) mengungkapkan penerapan UNCLOS yang mengkriminalisasi pembajakan khususnya yang terjadi di Somalia menjadi *Norma Jus Cogens* dalam hukum internasional pada pertengahan abad ke-19. Meskipun hukum ini tidak efektif dalam penegakan hukuman

secara langsung, namun keberadaan hukum ini telah mendorong keterlibatan politik dan penggunaan hukum rezim.

Kemudian, Gong, Jiang dan Yang (2023) mengevaluasi efektivitas berbagai strategi anti-piracy dan dampaknya terhadap keamanan jalur perdagangan maritim. Jurnal ini mengusulkan model untuk menilai risiko pembajakan dan mengkaji kebijakan yang dapat meningkatkan keamanan di jalur perdagangan maritim. Terdapat pengaruh luas dari kegiatan pembajakan terhadap moral awak kapal dan dampak selanjutnya terhadap operasi maritim internasional dan keamanan perdagangan. Mengingat adanya kejahatan pembajakan sangat mempengaruhi aliran perdagangan dan hasil ekonomi, serta stabilitas dan keamanan.

Dengan diartikan sebagai tindakan kekerasan dan terdapat penahanan yang dilakukan di laut lepas, perompakan biasanya dilakukan untuk keuntungan pribadi yang justru merugikan banyak negara. Adanya UNCLOS yang mulai aktif saat kasus perompakan di Somalia, dinilai belum efektif dalam penegakan hukum, namun statusnya sebagai *Norma Jus Cogens* telah memperkuat keterlibatan politik dan penggunaan rezim hukum internasional. Mengevaluasi dan memodelkan risiko pembajakan penting dilakukan untuk meningkatkan keamanan jalur perdagangan maritim. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pembajakan tidak hanya terbatas pada keamanan maritim tetapi juga secara signifikan mempengaruhi moral awak kapal dan operasi perdagangan. Dengan demikian, perlunya kebijakan *anti-piracy* yang efektif dalam menjaga aliran perdagangan dan stabilitas ekonomi global.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dalam kerangka kerja sama internasional Indonesia telah memperlihatkan peran strategis dalam operasi *anti-piracy* terutama di jalur perdagangan vital seperti Selat Malaka. Inisiatif seperti patroli bersama dan peningkatan kapasitas keamanan menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengurangi insiden perompakan yang secara langsung dapat meningkatkan keamanan jalur perdagangan. Meskipun upaya ini cukup signifikan, akan tetapi tantangan masih tetap ada, hal tersebut dikarenakan adanya adaptasi dan evolusi taktik oleh para pelaku perompakan dalam melakukan aksi kejahatannya.

Keterlibatan aktif dalam forum internasional dan kerjasama dengan negara lain seperti yang dilakukan dengan Pakistan dan Malaysia, menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menghadapi masalah keamanan maritim yang kompleks.

Sehingga untuk memperkuat kebijakan keamanan maritim di masa depan, sebaiknya Indonesia dapat mengkaji dan menganalisa taktik dan strategi dari negara Jepang yang memiliki kapasitas besar dalam *Maritime Self-Defense Force* dan *Coast Guards*. Selain itu, Indonesia perlu terus mengembangkan dan memperbaharui strategi pertahanan maritim, memperkuat hukum nasional, dan memperdalam kerja sama internasional untuk mengatasi ancaman perompakan dan meningkatkan keamanan jalur perdagangan internasional. Keterlibatan lebih lanjut dalam inisiatif global dan regional akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam keamanan maritim global. Dengan demikian, Indonesia memerlukan kebijakan *anti-piracy* yang efektif dalam menjaga aliran perdagangan demi kestabilan ekonomi global.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Analisis Peran Indonesia dalam Anti Piracy Angkatan Laut untuk Mengamankan Jalur Perdagangan Internasional.

DAFTAR RUJUKAN

- Conway, James T., dkk. (2008). *A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower*. Naval War Collage Review. Winter.
- Febrica, S. (2023). *Anti-Piracy Cooperation*. The Palgrave Encyclopedia of Global Security Jurnales. Macmillan.
- Kementerian Perhubungan. (2018). *Empat Puluh Persen Jalur Perdagangan Dunia Melewati Indonesia*. Retrieved from <https://dephub.go.id/post/read/empat-puluh-persen-jalur-perdagangan-dunia-melewati-indonesia>
- Kurniasanti, Setiyono, J. (2020). *Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Internasional*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum). Vol 6 (1), p.29-47.

- Mestika Zed. (2008). *Metodologi Penulisan jurnal kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miller, Ben. (2022). *Piracy in Somalia: Understanding the Causes, Impact and Solutions*. Website: The World in Context. Retrieved from <https://www.worldincontext.com/piracy-in-somalia-understanding-the-causes-impact-and-solutions/>
- Paige, T. P. (2016). *The Impact and Effectiveness of UNCLOS on Counter-piracy Operations*. *Journal of Conflict and Security Law*. Vol. 22 (1), p.97-123.
- Poonnawatt, Kornwika. (2023). *Multilateral Cooperation Against Maritime Piracy in The Straits Of Malacca: From the RMSI to ReCAAPI*. *Marine Policy*.
- Po-Shing Tseng, Zhao-Chao Her & Pilcher Nick. (2021). *Piracy Defense Strategies For Shipping Companies And Ships: A Mixed Empirical Approach*. *Maritime Transport Research*.
- Saraswati, A. L. & N. K. Desy S. (2020). *Strategi Keamanan Maritim Indonesia terhadap Maritime Piracy di Laut Sulu Tahun 2016*. *Jurnal Transformasi Global*. Vol. 7 (1), p.114-143.
- Swastika, M. B. (2018). *Latar Belakang Peran Aktif Jepang di Anti-Piracy Asia Tenggara dalam Perspektif Konstruktivisme*. *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol. 6 (2), p.182-196.
- The Diplomat Insight. (2023). *Pakistan and Indonesia Conduct Joint Military Training Exercises*. Retrieved from <https://thediplomaticinsight.com/pakistan-and-indonesia-conduct-joint-military-training-exercises/>
- The Diplomat. (2023). *Piracy and Armed Robbery in Southeast Asia: The Need for a Fresh Approach*. Retrieved from <https://thediplomat.com/2023/05/piracy-and-armed-robbery-in-southeast-asia-the-need-for-a-fresh-approach/>
- Xiaoxing G., Huilin J., & Dong Y. (2023). *Maritime Piracy Risk Assessment and Policy Implications: A Two-Step Approach*. *Marine Policy*.